

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian tinjauan pustaka ini disajikan beberapa penelitian terdahulu, hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah letak persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti.

Pertama, studi yang dilakukan oleh Faisyal Rani (2012) tentang Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. Fokus dari studi ini adalah tentang bagaimana membangun wilayah perbatasan indonesia dengan menggunakan perspektif sosial pembangunan, Landasan teori dari studi ini yaitu teori perbatasan dan teori wilayah sedangkan metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Hasil dari studi yang dilakukan oleh Faisyal Rani (2012) menunjukkan bahwa wilayah perbatasan memegang peran penting dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan wilayah negara serta menjaga keutuhan wilayah. Dilihat dari perspektif keamanan indonesia termasuk negara yang memiliki kemandirian perbatasan yang ‘’menghawatirkan’’ sehingga dapat dikatakan bahwa paradigma pembangunan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara belum diwujudkan secara optimal hal ini memberikan perspektif bahwa

komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun daerah perbatasan masih sangat rendah.

Terdapat perbedaan antara studi yang dilakukan oleh Faisyal Rani (2012) dengan studi yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada fokus penelitian dimana peneliti sebelumnya meneliti tentang bagaimana membangun wilayah perbatasan Indonesia dengan menggunakan perspektif sosial pembangunan, sedangkan peneliti sekarang berfokus pada model pembangunan yang ideal yang cocok digunakan untuk membangun wilayah perbatasan, perbedaan selanjutnya terletak pada landasan teori yang digunakan dimana peneliti sebelumnya menggunakan Landasan teori perbatasan dan teori wilayah sedangkan peneliti sekarang menggunakan landasan teori pengembangan dan pembangunan desa, kemudian perbedaan lain terletak pada metode yang digunakan yaitu peneliti sebelumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif.

Kedua studi yang dilakukan Wilfridus Erwin Berek Metty (2017) tentang Konsep Pembangunan ekonomi Kawasan Perbatasan Berbasis Keruangan Di Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT. Fokus dari studi ini yaitu penyusunan konsep pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang berbasis keruangan yang ada di desa silawan kabupaten belu NTT. Teori yang digunakan dalam studi ini yaitu teori pengembangan kawasan perbatasan dan Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kawasan perbatasan dikembangkan untuk mengurangi maupun menghilangkan

ketimpangan di daerah perbatasan salah satunya yaitu pembangunan yang berbasis keruangan. Di desa silawan semua aktifitas ekonomi hanya berpusat pada PLBN (pos lintas batas negara) sehingga perlu dilakukan persebaran ekonomi ke wilayah lain di kabupaten belu dengan membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana agar kegiatan ekonomi yang ada di kabupaten belu lebih efektif dan efisien.

Dalam studi yang diteliti oleh Wilfridus Erwin Berek Metty (2017) dengan studi yang dilakukan oleh penulis sekarang terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pertama pada fokus studi dimana Wilfridus Erwin Berek Metty (2017) memfokuskan studinya pada penyusunan konsep pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang berbasis keruangan yang ada di desa silawan kabupaten belu NTT sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada model pembangunan yang ideal bagi desa perbatasan di Desa Lo'okeu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Syamsuri (2014) tentang Analisis Teoritik Model Pembangunan Daerah (Desa) Tertinggal. Fokus dari studi ini yaitu tentang model atau kebijakan pembangunan untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Teori yang digunakan dalam studi ini yaitu teori pembangunan desa, dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif.

Hasil penelitian dari studi ini menunjukkan bahwa secara nasional pembangunan ekonomi selama ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara meluas dan merata. Faktor utama terjadinya hal ini yaitu

tingginya tingkat kesenjangan dan kemiskinan terutama antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Hal ini disebabkan ketidakmerataan dan ketidakadilan distribusi pembangunan karena kebijakan pembangunan lebih mengutamakan pembangunan di daerah perkotaan dan pusat-pusat pemerintahan sedangkan di daerah pedesaan kurang diberi perhatian yang serius sehingga terjadi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di pedesaan.

Dari studi Syamsuri (2014) dengan studi yang dilakukan oleh penulis sekarang terdapat perbedaan. Adapun perbedaan tersebut terletak pada bagian fokus studi dimana Fokus dari peneliti sebelumnya yaitu tentang model atau kebijakan pembangunan untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal namun tidak menjelaskan model yang ideal yang cocok digunakan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal sedangkan peneliti sekarang berfokus pada model yang cocok digunakan untuk membangun desa-desa perbatasan yang tertinggal.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengembangan Wilayah

2.2.1.1 Pengertian Pengembangan Wilayah

Teori pengembangan wilayah adalah salah satu teori dalam ilmu geografi dan perencanaan kota yang membahas tentang bagaimana pengembangan wilayah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Teori ini berfokus pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan di suatu wilayah, serta bagaimana mengelola pengembangan wilayah tersebut secara efektif. Zen dalam Etric Oktafrida & Muhammad Roychansyah (2023, p. 175) mendefinisikan pengembangan wilayah sebagai suatu bentuk hubungan yang tercipta antara sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat yang berjalan secara harmonis dengan mempertimbangkan daya tampung.

Pengembangan wilayah menurut Mulyanto dalam Hoirun Disa (2014, p. 29) merupakan salah satu hal yang penting dan harus ada dalam tujuan perencanaan daerah. Pengembangan wilayah perlu didasarkan pada potensi fisik, sosial dan budaya yang ada di daerah tersebut. Pengembangan wilayah menurut Mulyanto dalam Hoirun Disa (2014, p. 29) adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi- kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di daerah tersebut dan dalam skala nasional

Tujuan dari pengembangan wilayah menurut Mulyanto dalam Hoirun Disa (2014, p. 29) terdiri dari 3 aspek yaitu:

1. Sosial

Usaha-usaha mencapai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan individu, keluarga dan seluruh masyarakat di dalam wilayah tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan mengurangi pengguran dan menyediakan sarana dan prasarana kehidupan yang baik seperti pemukiman, fasilitas transportasi, kesehatan, air minum dan lainnya.

2. Ekonomi

Usaha-usaha mempertahankan dan memacu perkembangan dan pertumbuhan kesinambungan dan perbaikan kondisi-kondisi ekonomis yang baik bagi kehidupan dan memungkinkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

3. Wawasan Lingkungan

Pencegahan kerusakan dan pelestarian terhadap keseimbangan lingkungan. Aktivitas ekonomi apapun yang manusia lakukan dengan mengambil sesuatu dari atau memanfaatkan potensi alam akan mempengaruhi keberlangsungan alam itu sendiri

2.2.1.2 Komponen dan Sistem Pengembangan Wilayah

Komponen pengembangan wilayah menurut Rustiadi dalam Oktaviana Mustika Dewi (2013, p. 11) adalah suatu pokok bahasan yang mempunyai peranan dalam pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam menganalisis perkembangan wilayah. Oleh karena itu, komponen tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat perkembangan di suatu wilayah. Prinsip utama dalam perkembangan wilayah adalah pengembangan sektor yang paling potensial sebagai sektor penggerak dan diterapkan pada daerah yang tepat sehingga terjadi penjalaran pertumbuhan.

Tingkat pengembangan wilayah menurut Muamar dalam Mike Dewayanti, et, al, (2020, p. 11) dapat dilihat secara sederhana menggunakan tiga komponen, sebagai berikut:

1. Jumlah Fasilitas Sarana Sosial Ekonomi: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana ekonomi.
2. Kependudukan: jumlah penduduk dan kepadatan penduduk.
3. Aksesibilitas Wilayah: luas wilayah, jarak ke ibukota kabupaten, dan panjang jalan

Sistem pengembangan wilayah menurut dalam Alya Wirahadi Purnama (2021, pp. 12–13) dibagi atas dua jenis, yaitu :

- 1) Pengembangan Wilayah Sistem Top Down

Sistem top down didefinisikan menjadi 3 konsep, yaitu konsep kutub pertumbuhan (*growth pole*), integrasi fungsional-spasial, dan pendekatan

decentralized territorial. Konsep *growth pole* diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga pertumbuhan dapat menyebar (*spread effect*) atau dapat memberi efek tetesan (*trickle down effect*) kepada daerah di sekitarnya. Konsep integrasi merupakan konsep yang menggunakan pendekatan dengan mengutamakan adanya integrasi yang terbentuk secara sengaja pada beragam pusat pertumbuhan akibat adanya konsep yang komplementer. Konsep integrasi menyatakan bahwa suatu wilayah memiliki hierarki. Sedangkan konsep desentralisasi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan pada konsep *growth pole*, karena konsep *growth pole* dapat menimbulkan *backwash effect* yang merugikan wilayah sekitarnya, pendekatan desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah dalam sumber daya modal dan sumber daya manusia tidak terdapat aliran keluar.

2) Pengembangan Wilayah Sistem *Bottom Up*

Sistem *bottom up* dalam pengembangan wilayah merupakan bentuk respon dari konsep pembangunan *development from above* atau konsep pembangunan dari atas, Konsep pengembangan wilayah dengan sistem *bottom up* sering dikenal juga sebagai konsep pembangunan dari bawah (*development from below*). Agropolitan adalah salah satu bentuk dari konsep pengembangan wilayah dengan sistem *bottom up*. Dalam pengembangan wilayah terdapat peran penting dari dimensi ruang, karena dengan adanya ruang dapat menimbulkan kemajuan bagi individu di sisi lain juga ruang dapat menimbulkan konflik. Dari segi kuantitas, ruang memiliki jumlah yang

terbatas, sedangkan dari segi kualitas, ruang memiliki beragam potensi. Dalam penyusunan kebijakan pengembangan wilayah memerlukan adanya intervensi perencanaan yang berwawasan keruangan, dengan demikian diharapkan dapat terciptanya keselarasan dari berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah

2.2.Pembangunan Desa

2.2.1 Pengertian Pembangunan Desa

Menurut beberapa pakar, teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan kedalam dua paradigma yaitu modernisasi dan ketergantungan (Kumba Digidowiseiso, 2019, p. 1).

Di dalam paradigma Modernisasi termasuk teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan tersebut. Sedangkan paradigma Ketergantungan mencakup teori-teori Keterbelakangan (*Underdevelopment*), Ketergantungan (*Dependent Development*), dan Sistem Dunia (*World System Theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (Kumba Digidowiseiso, 2019, p. 1).

Agus Suryono dalam Abu Rahum (2015, p. 1630) mendefinisikan Pembangunan adalah upaya yang terus menerus yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan dengan serasi dan dinamis, sedangkan keluar dapat menciptakan keseimbangan.

Rogers dalam Ida Suryani Wijaya (2015, p. 55) mendefinisikan pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebenaran, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Inayatullah dalam Ida Suryani Wijaya (2015, p. 55) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Kleinjans dalam Ida Suryani Wijaya (2015, p. 55) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses pencapaian pengetahuan dan ketrampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya suatu kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri.

Soerjono Soekanto dalam Apandi Apid (2017, p. 715) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang di rencanakan dan di kehendaki. Dari pendapat ini di kemukakan bahwa pembangunan dari proses perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab di dasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.2.2 Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial.(I Nyoman Shuida, 2016, p. 8)

Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya, hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum dapat dijangkau ataupun mengakses pembangunan desa pada berbagai tahapan. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, di antaranya adalah anak-anak, perempuan, warga lanjut usia, dan tentu saja warga berkebutuhan khusus (disabilitas), sehingga dampak pembangunan desa sama sekali tidak dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut.(I Nyoman Shuida, 2016, p. 8)

Djiwadono dalam Umami Nurul Hidayah (2018, p. 33) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a) Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas da daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b) Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c) Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d) Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan

Berbagai prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa pada terminologi desa membangun menurut Sutoro Eko dalam Yogi Pasca Pratama, et, al 2018, p. 38) adalah :

- 1) Kemandirian desa dalam perencanaan
- 2) Pembangunan didasarkan pada kearifan lokal dalam pengelolaan tata ruang dan sumber daya lokal
- 3) Pembangunan dilakukan di desa dan berskala desa
- 4) Pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada kewenangan desa pada kewenangan asal-usul (mengelola communal goods) dan kewenangan nyata (mengelola *public goods*)
- 5) Pelaksanaan pembangunan merupakan kewenangan pemerintah desa dan masyarakat

- 6) Pembangunan desa harus mengikutsertakan tokoh masyarakat lokal maupun pendamping dari pihak luar yang memahami lokalitas desa
- 7) Peran pemerintah dalam pembangunan desa melalui pengakuan, dukungan, penguatan dan supervisi
- 8) Terkait dengan alokasi dana dari pemerintah sebaliknya dikelola melalui satu pintu yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Desa

Indeks pembangunan desa (IPD) ialah sebuah tolak ukur dalam menentukan nilai kemajuan dan perkembangan desa-desa di Indonesia. Trilaksono & Sukartini dalam Muhammad Azlan (2023, p. 21) mengklasifikasikan menjadi 5 (lima) status desa yaitu sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki system pelayanan yang lengkap, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang mudah ditemui, pemberian pelayanan yang bagus serta penyelenggaraan pemerintah yang sudah maju. Desa pada status ini sudah dapat dikategorikan desa pintar yang memiliki banyak inovasi pada pelaksanaan pemerintahannya.
- b. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang adalah desa yang memiliki pelayanan seadanya, infrastruktur yang masih dalam proses pembangunan, pelayanan umum

yang masih standar serta penyelenggaraan pemerintah yang cukup memadai.

- d. Desa Tertinggal adalah desa yang segala sesuatunya minim, baik itu pelayanan dasarnya, infrastruktur, transportasi yang sulit ditemui, serta pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang memadai
- e. Desa Sangat Tertinggal adalah desa dengan klasifikasi paling rendah. Pada desa dengan status sangat tertinggal ini tidak adanya pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur yang sangat sedikit, tidak adanya transportasi dan aksesibilitas serta tidak adanya pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Dapat disimpulkan sdesa pada status ini merupakan desa pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan daerah

Indeks pembangunan desa menurut Roziana A Hidayati dalam Muhammad Azlan (2023, pp. 23–24) dibagi menjadi 5 dimensi yaitu sebagai berikut :

- a. Pelayanan Dasar merupakan kebutuhan utama dalam pembangunan desa. Pelayanan dasar terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan akses terhadap kesehatan sangat mempengaruhi pembangunan sebuah desa.
- b. Infrastruktur merupakan kebutuhan penting untuk terlaksananya segala kegiatan di sebuah desa. Infrastruktur dalam hal ini terdiri infrastruktur ekonomi, energy, air bersih serta komunikasi dan informasi. Segala bentuk infrastruktur ini perlu dilengkapi dalam sebuah guna mendukung terlaksananya pembangunan desa.

- c. Aksesibilitas/Transportasi merupakan akses untuk sampai menuju sebuah desa. Aksesibilitas sangat penting sebab akan menentukan pemenuhan kebutuhan pembangunan di sebuah desa. Sulitnya aksesibilitas/transportasi akan membuat segala kebutuhan pembangunan sulit sampai ke desa, hal itu akan membuat pelaksanaan pembangunan terhambat. Oleh karena itu sangat perlu bagi sebuah desa untuk memperbaiki aksesibilitas/transportasi menuju desa untuk membangun desanya. Adapun indikatornya terdiri aksesibilitas jalan dan aksesibilitas sarana transportasi.
- d. Pelayanan Umum merupakan segala kebutuhan masyarakat akan pemenuhan pelayanan baik itu barang, jasa maupun pelayanan administrasi. Indikator penyusun pelayanan umum terdiri dari aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pemerintah mengelola lingkungan desa dan bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat akan membantu dalam pelaksanaan pembangunan desa nantinya.
- e. Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan pelaksanaan tugas pokok pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan pelaksanaan dari tugas otonomi daerah yang telah diberikan kepada desa. Adapun indikator dari penyelenggaraan pemerintahan ialah kinerja pemerintahan desa, pelaksanaan otonomi desa, pengelolaan kekayaan desa, serta sumber daya manusia di desa. Indikator tersebut sangat berperan penting dalam memperkuat pemerintahan desa. Tercipnya

pemerintahan desa yang kuat maka akan tercipta pula pembangunan desa yang maju

2.2.2.4 Model-Model Pembangunan Desa

2.2.2.4.1 Model Pembangunan Desa Mandiri Terpadu

1. Pengertian Model Pembangunan Desa Mandiri Terpadu

Desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu desa menuju desa mandiri, adalah potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi pembeli (pasar), kelembagaan, dan budaya lokal. Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014. Desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang mempunyai indeks pembangunan desa (IPD) lebih dari 75.

Konsep desa mandiri adalah pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan (supporting system). Pengembangan yang akan dilakukan pada desa mandiri, adalah pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa, pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa, pengembangan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat desa, serta pengembangan jejaring dan kemitraan. Manfaat dari desa yang telah

mandiri, adalah berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa, meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, serta menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

Pembangunan Desa Terpadu Mandiri menurut Soetomo dalam (Muhammad Fahmi Fajar, 2020, p. 27) adalah sebuah strategi pembangunan yang merupakan proses lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang cukup intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus dan perhatian kepada kelompok ataupun daerah tertentu, yang melalui penyampaian pelayanan, serta bantuan dan informasi kepada masyarakat desa.

2. karakteristik model pembangunan Desa mandiri terpadu

Salah satu karakteristik dari desa mandiri terpadu adalah desa yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, akses jalan, dan komunikasi. Suatu desa di katakan mandiri apabila memenuhi syarat-syarat seperti :

- ✓ Pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan
- ✓ Tersedianya anggaran atau dana desa untuk mengelol berbagai kegiata baik pembangunan maupun pemberdayaan
- ✓ Adanya pendampingan desa dan kerjasama antar desa maupun pihak lain

- ✓ Partisipasi aktif dalam kelembagaan masyarakat maupun dilingkungan masyarakat.

Bertolak dari syarat-syarat desa mandiri di atas maka langkah-langkah atau strategi yang harus dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan kemandirian desa adalah sebagai berikut:

- ✓ Mendorong masyarakat desa terlihat aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan desa
- ✓ Membangun kelembagaan ekonomi desa mandiri dan produktif berbasis sumber daya/potensi desa
- ✓ Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif, partisipatif,, akuntabel, dan transpar
- ✓ Menumbuhkembangkan budaya dan nilai-nilai sosial desa seperti kegotongroyongan dan lain-lain.

3. Indikator Desa Terpadu Mandiri

Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT), dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu :

- a) Dimensi Ketahanan Sosial yang dilihat dari aspek Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Permukiman
- b) Dimensi Ketahanan Ekonomi yang dilihat dari aspek Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit dan Keterbukaan Wilayah

c) Dimensi Ketahanan Ekologi / Lingkungan yang dilihat dari aspek Kualitas Lingkungan, Bencana Alam dan Tanggap Bencana

Indikator Desa Terpadu Mandiri menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat dari lima dimensi :

- a) Pelayanan dasar
- b) Kondisi infrastruktur
- c) Akseibilitas/transportasi
- d) Pelayanan umum
- e) Penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.2.4.2 Model Pembangunan Desa Inovatif

1. Pengertian model pembangunan desa inovatif

Desa unovatif merupakan implementasi dari konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang mendasarkan pertumbuhannya pada *endogenous development* atau pengembangan desa yang benar-benar bertumpu pada potensi sumber daya yang dimilikinya.

Pembangunan Desa Inovatif ialah kegiatan-kegiatan pemberdayaan melalui pembangunan dalam bentuk perbaikan mutu hidup dan perilaku yang mencakup aspek peningkatan kemampuan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemampuan SDM aparatur pemerintah desa berbasis Iptek. (Suharyanto & Arif Sofianto, 2012, p. 252)

2. Ruang lingkup pembangunan desa inovatif menurut Yuyun Maulida (2018, pp. 19–20) ialah :

a) Kegiatan Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa

Merupakan kegiatan pengelolaan pengetahuan untuk mendorong munculnya inovasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan pengetahuan dilakukan secara sistematis, terencana dan partisipatif meliputi proses, identifikasi, validasi, dokumentasi, pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan replikasi. Kegiatan ini mendukung dengan Dana Operasional Kegiatan (DOK) bantuan pemerintah pengelolaan pengetahuan inovasi desa.

b) Pengembangan Kapasitas

Penyediaan Jasa Layanan Teknis Penyediaan Jasa Layanan Teknis (PJLT) adalah organisasi atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara profesional serta berkomitmen membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dibidang kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur. Jenis layanan teknis yang disediakan PLJT meliputi tiga bidang kegiatan utama yang tidak dapat diberikan oleh pendamping profesional dalam mendukung Kemandirian Desa, antara lain; (1) kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial)

dan (3) infrastruktur Desa. PLJT memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, monitoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan Desa, PLJT dapat memfasilitasi Desa dalam mengidentifikasi, mengorganisir dan memanfaatkan jaringan kerja yang mendukung meningkatkan produktivitas dan hasil guna kegiatan di Desa.

c). Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa

Sistem informasi pembangunan desa merupakan solusi bagi percepatan pengelolaan, evaluasi dan Analisis data desa, untuk tujuan percepatan pembangunan desa dan produktivitas desa berbasis pada pengelolaan data pembangunan desa tidak terlepas dengan data dasar yang selama ini dihasilkan dikementrian desa dan aplikasi pengelolaan data yang sudah berjalan di desa.